

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan 3 (khususnya data September 2025 y-on-y), kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Berau dipicu oleh kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran utama, yang juga mencakup kebutuhan pokok, barang lainnya, dan jasa:

- Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau: Kenaikan sebesar 4,26%. Kelompok ini sering menjadi penyumbang utama inflasi karena mencakup kebutuhan pokok seperti beras, cabai, daging, dll.
- Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (Jasa): Kenaikan sebesar 3,85%.
- Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (Jasa): Kenaikan tertinggi sebesar 6,62%.
- Kelompok Kesehatan (Jasa): Kenaikan sebesar 2,47%.
- Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar: Kenaikan sebesar 0,32%.

#### Penahan Inflasi (Deflasi)

Laju inflasi tertahan oleh beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga (deflasi), antara lain:

- Kelompok Transportasi: Penurunan sebesar 2,01%. Penurunan ini sering kali dipengaruhi oleh stabilisasi atau penurunan tarif angkutan (seperti tiket pesawat/angkutan udara) atau harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan: Penurunan sebesar 0,26%.

#### Risiko Inflasi ke Depan Kabupaten Berau

Risiko inflasi ke depan di Kabupaten Berau biasanya terkait dengan faktor-faktor berikut Seperti yang diantisipasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat:

- Harga Kebutuhan Pokok (Volatile Food): Permintaan yang tinggi pada periode tertentu (misalnya menjelang Hari Raya Besar seperti Idul Fitri atau Natal dan Tahun Baru Nataru) cenderung menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok secara signifikan, yang berpotensi memicu kelangkaan stok jika tidak diantisipasi. Komoditas seperti beras (ketersediaan pasokan Bulog dan kelancaran distribusi) menjadi perhatian utama.
- Transportasi: Meskipun terjadi deflasi di Triwulan 3/2025, harga transportasi, terutama tiket pesawat, sering menjadi faktor penyumbang inflasi yang tinggi di wilayah seperti Berau karena faktor geografis dan ketergantungan pada konektivitas udara. Fluktuasi tarifnya perlu terus diwaspadai.
- Pengawasan Stok dan Harga: Potensi risiko berupa adanya pedagang yang "memainkan" stok maupun harga menjelang periode permintaan tinggi (seperti Nataru) menjadi perhatian yang harus diatasi dengan pengawasan ketat dan langkah antisipatif.
- Pemberdayaan Petani Lokal: Optimasi hasil panen petani lokal menjadi strategi jangka panjang untuk menekan angka inflasi dengan memastikan pasokan lokal tersedia dengan harga bersaing, sekaligus menjaga kesejahteraan petani.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan di Berau sangat terkait erat dengan posisinya sebagai daerah di Kalimantan Timur yang memiliki tantangan logistik yang unik dan ketergantungan pada pasokan dari luar.

1. Ketergantungan Pasokan Luar (Sisi Produksi)

Defisit Pangan Lokal: Produksi pertanian dan peternakan lokal (khususnya untuk komoditas strategis seperti beras, bawang merah, cabai) seringkali tidak mencukupi kebutuhan konsumsi lokal. Hal ini memaksa Berau untuk bergantung pada pasokan dari Jawa atau Sulawesi. Risiko Shock Harga Asal: Karena bergantung pada pasokan luar, Berau sangat rentan terhadap gejolak harga dan pasokan di daerah produsen. Jika terjadi masalah panen atau larangan distribusi di Jawa, harga di Berau langsung melambung. Optimalisasi Lahan Belum Maksimal: Meskipun memiliki potensi lahan, tantangan dalam mengoptimalkan produksi pangan lokal (seperti ketersediaan irigasi, kualitas bibit, dan minat petani) masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan swasembada pangan.

## 2. Tantangan Logistik dan Distribusi (Sisi Biaya)

Biaya Transportasi Darat dan Laut Tinggi: Komoditas harus melalui rute yang panjang (laut dari Jawa/Sulawesi, dilanjutkan distribusi darat ke Berau). Biaya angkut yang mahal ini menjadi komponen terbesar dalam pembentukan harga eceran di pasar Berau. Infrastruktur Penunjang yang Terbatas: Keterbatasan gudang penyimpanan berpendingin (cold storage), terutama untuk komoditas fresh seperti daging dan sayuran, menyebabkan tingginya waste (kerusakan) dan mendorong pedagang menaikkan harga jual untuk menutupi kerugian.

Harga Komponen Transportasi (Aviation Fuel): Fluktuasi harga tiket pesawat atau bahan bakar transportasi udara sangat mempengaruhi inflasi di Berau (seperti terlihat dari deflasi/inflasi Kelompok Transportasi) karena konektivitas udara memainkan peran penting dalam pergerakan barang dan jasa.

## 3. Komoditas Penyumbang Utama (Volatile Food) Beras (Komoditas Strategis): Beras adalah makanan pokok dan menjadi perhatian utama. Inflasi akan sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi beras Bulog dan ketersediaan stok di Gudang Beras (Sub-Divre) Berau. Komoditas Hortikultura: Harga cabai, bawang, dan sayuran sangat fluktuatif karena sensitif terhadap cuaca di daerah produsen dan tingginya risiko kerusakan dalam perjalanan jauh. Kenaikan harga kelompok ini adalah pemicu utama inflasi.

## 4. Koordinasi dan Data

Sinkronisasi Data Stok: Adanya potensi perbedaan data mengenai stok yang tersedia antara Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan BPS dapat menghambat kecepatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berau dalam mengambil keputusan intervensi pasar (misalnya, Operasi Pasar). Efektivitas Intervensi Pasar: Kegiatan intervensi seperti Operasi Pasar Murah harus dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Permasalahannya adalah memastikan bahwa barang yang dijual dengan harga subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat rentan dan tidak disalahgunakan.

Secara ringkas, permasalahan pengendalian inflasi di Berau didominasi oleh faktor cost push inflation (inflasi dorongan biaya), terutama yang berasal dari biaya logistik dan ketergantungan pasokan dari luar daerah.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### 1. Pelaksanaan Kebijakan di Pilar Ketersediaan Pasokan (Supply Side)

Tujuan: Mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dan menstabilkan harga komoditas *volatile food*.

Optimalisasi Lahan dan Produksi Lokal:

1.

Meningkatkan luas tanam dan produktivitas komoditas unggulan yang menjadi pemicu inflasi, seperti padi, bawang, dan cabai, melalui intensifikasi dan perluasan areal tanam.

Mendorong kemandirian benih/bibit unggul untuk meningkatkan hasil panen petani lokal.

2. Kerja Sama Antar Daerah (KAD):

Mengintensifkan perjanjian dagang dengan daerah produsen (surplus) di luar Berau, seperti di Sulawesi atau Jawa, untuk menjamin pasokan rutin

dengan harga yang disepakati, memotong rantai distribusi yang terlalu panjang.

3. Pengamanan Stok Cadangan:

Memastikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola Bulog Sub-Divisi Berau selalu memadai, terutama untuk komoditas beras, agar dapat diintervensi saat terjadi lonjakan harga.

## **2. Pelaksanaan Kebijakan di Pilar Kelancaran Distribusi (Logistik)**

Tujuan: Menurunkan biaya logistik (*cost-push inflation*) dan memperlancar pergerakan barang.

1. Subsidi dan Fasilitasi Transportasi:

Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi biaya angkut (contoh: subsidi ongkos kirim) untuk komoditas strategis yang didatangkan dari luar Berau, sehingga harga jual di tingkat konsumen tidak terlalu tinggi.

2. Pengawasan Rantai Pasok:

Melakukan pemantauan rutin terhadap gudang penyimpanan dan jalur distribusi untuk mencegah praktik penimbunan (*hoarding*) oleh spekulan, terutama menjelang hari besar keagamaan.

3. Penyediaan Infrastruktur Pendingin:

Mendorong investasi atau menyediakan fasilitas *cold storage* di pasar atau tempat penampungan untuk mengurangi tingkat kerusakan (*waste*) produk *fresh* (daging, ikan, sayuran) selama proses distribusi.

## **1. Pelaksanaan Kebijakan di Pilar Keterjangkauan Harga**

Tujuan: Memastikan harga barang pokok terjangkau oleh masyarakat dan sesuai dengan HET/harga acuan.

1. Operasi Pasar Murah (OPM) / Pasar Penyeimbang:

Melakukan intervensi pasar secara masif dan terukur dengan menjual komoditas pokok

(terutama beras, minyak, gula, cabai) dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, menggunakan stok dari Bulog atau hasil KAD.

Fokus OPM di wilayah padat penduduk atau daerah yang terisolir yang rentan terhadap kenaikan harga.

## 2. Pengawasan Harga Pasar:

Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan rutin melakukan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor untuk memastikan tidak ada pedagang yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

## 3. Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pangan:

Penyaluran Bansos yang efisien dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin/rentan untuk menjaga daya beli mereka, sehingga dampak kenaikan harga dapat diminimalisir.

# 4. Pelaksanaan Kebijakan di Pilar Komunikasi Efektif

Tujuan: Membangun ekspektasi publik yang positif dan memastikan kebijakan tersampaikan dengan baik.

## 1. Publikasi Data Harga Rutin:

Memperbarui dan mempublikasikan data harga pangan harian yang akurat melalui media massa dan *platform* digital agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memantau pergerakan harga.

## 2. Rapat Koordinasi TPID Berkala:

Melakukan rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (BPS, Bank Indonesia perwakilan, Bulog, Dinas terkait, Kepolisian) secara rutin untuk sinkronisasi data dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

## 3. Edukasi Konsumen:

Mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan pengeluaran dan pentingnya melakukan substitusi komoditas (misalnya mengganti cabai rawit dengan cabai kering atau cabai beku) ketika terjadi lonjakan harga ekstrem.

# 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Berdasarkan Kebijakan (4K)

## 1. Evaluasi Ketersediaan Pasokan (Produksi & Stok)

Aspek Positif: Kerja sama antar daerah (KAD) dan pengamanan stok Bulog kemungkinan besar efektif dalam mencegah lonjakan harga yang ekstrem, terutama pada beras.

Aspek yang Perlu Ditingkatkan:

Proyeksi dan Realisasi Produksi Lokal: Kebijakan peningkatan produksi pangan (seperti program cetak sawah atau bantuan bibit) belum sepenuhnya mengurangi ketergantungan impor Berau. Perlu dievaluasi *gap* antara target produksi dan realisasi panen. Keberlanjutan KAD: Perlu evaluasi apakah KAD memberikan jaminan harga yang stabil dan jangka panjang, atau hanya bersifat *ad-hoc* saat terjadi gejolak.

## 2. Evaluasi Kelancaran Distribusi (Logistik & Rantai Pasok)

Aspek Positif: Pengawasan rantai pasok mungkin berhasil mencegah penimbunan besar-besaran, yang dibuktikan dengan stabilitas inflasi.

Aspek yang Perlu Ditingkatkan:

- Efektivitas Subsidi Logistik: Jika ada kebijakan subsidi transportasi, perlu dievaluasi seberapa besar subsidi tersebut benar-benar tercermin pada penurunan harga jual kepada konsumen akhir, bukan hanya dinikmati oleh distributor.
- Infrastruktur Dingin: Kebijakan pengadaan *cold storage* atau infrastruktur pasca-panen perlu dievaluasi kontribusinya dalam menurunkan tingkat kerusakan (*waste*) produk hortikultura dan daging, yang secara langsung memengaruhi harga.

## 3. Evaluasi Keterjangkauan Harga (Intervensi Pasar)

Aspek Positif: Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan pemanfaatan stok Bulog diyakini berhasil menahan ekspektasi inflasi masyarakat dan memberikan opsi harga yang lebih rendah.

Aspek yang Perlu Ditingkatkan:

- Targeting OPM: Perlu dievaluasi apakah OPM sudah tepat sasaran kepada kelompok masyarakat rentan dan tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan.
- Pengawasan HET: Walaupun ada pengawasan, perlu dievaluasi efektivitas sanksi bagi pedagang yang melanggar HET, terutama pada komoditas beras.

## 4. Evaluasi Komunikasi dan Koordinasi (TPID)

Aspek Positif: Stabilitas inflasi di T-3 menunjukkan koordinasi antar instansi (TPID) berjalan baik dalam merespons gejolak.

Aspek yang Perlu Ditingkatkan:

- Akurasi Data: Perlu evaluasi lebih lanjut terhadap sinkronisasi data proyeksi panen dan stok antar dinas, karena data yang berbeda dapat menyebabkan intervensi yang terlambat atau berlebihan.

## 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Berau efektif dalam menjaga inflasi umum (y-on-y) agar tetap stabil dan rendah. Namun, permasalahan struktural yang didorong oleh biaya logistik tinggi dan ketergantungan pangan belum sepenuhnya

Rekomendasi Prioritas:

◦

Penguatan Struktur Pangan Lokal: Mengalihkan fokus kebijakan dari *sekadar* intervensi

1. pasar ke penguatan produksi lokal untuk komoditas yang paling defisit (cabai, bawang, sayuran) agar ketahanan pangan Berau meningkat.
2. Efisiensi Logistik Regional: TPID perlu menargetkan kebijakan yang mengurangi biaya logistik dari daerah produsen utama, misalnya dengan membuat perjanjian jangka panjang yang mencakup subsidi kapal kargo/trucking.
3. Transparansi Harga: Meningkatkan publikasi harga acuan dan harga jual agar masyarakat dan pedagang mendapatkan informasi yang sama, sehingga mengurangi ketidakpastian harga.